



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN 2023



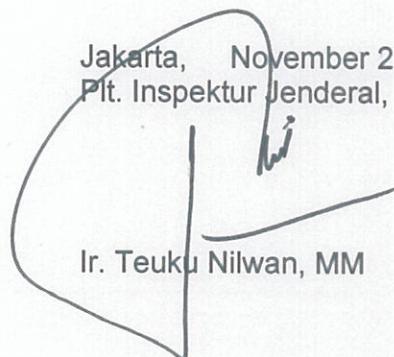
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja Inspektorat Jenderal KKP) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Renja Inspektorat Jenderal KKP adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KKP. Renja Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023 memuat kebijakan, program, dan kegiatan beserta alokasi anggaran pengawasan intern tahun 2023 di lingkungan KKP.

Inspektorat Jenderal KKP menetapkan sasaran program pengawasan intern di lingkungan KKP, yaitu “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP”. Sasaran program tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern. Sasaran program tersebut selanjutnya diterjemahkan menjadi 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu sasaran kegiatan “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra” yang merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan intern dan sasaran kegiatan “Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal” yang merupakan acuan dalam meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Inspektorat Jenderal KKP serta seluruh pihak yang terlibat pada proses penyusunan Renja Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023. Semoga Renja Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP tahun 2023.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Itjen	MR
Koord. Program	+
Sub Koord. PP	/

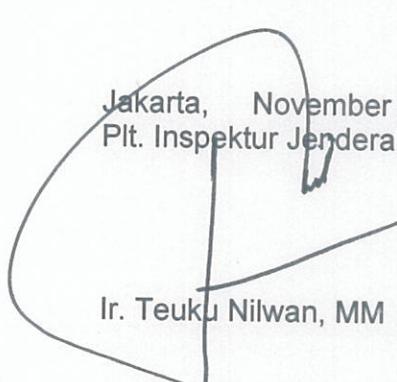
Jakarta, November 2022
Plt. Inspektur Jenderal,

Ir. Teuku Nilwan, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja Inspektorat Jenderal KKP) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Renja Inspektorat Jenderal KKP adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KKP. Renja Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023 memuat kebijakan, program, dan kegiatan beserta alokasi anggaran pengawasan intern tahun 2023 di lingkungan KKP.

Inspektorat Jenderal KKP menetapkan sasaran program pengawasan intern di lingkungan KKP, yaitu “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP”. Sasaran program tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern. Sasaran program tersebut selanjutnya diterjemahkan menjadi 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu sasaran kegiatan “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra” yang merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan intern dan sasaran kegiatan “Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal” yang merupakan acuan dalam meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Inspektorat Jenderal KKP serta seluruh pihak yang terlibat pada proses penyusunan Renja Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023. Semoga Renja Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP tahun 2023.

Jakarta, November 2022
Plt. Inspektur Jenderal,

Ir. Teuku Nilwan, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN	1
2. RENJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023	3
2.1. Kebijakan Pengawasan	3
2.2. Program, Kegiatan dan Rincian Output Itjen KKP Tahun 2023	5
2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Program	6
2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Intern	7
2.5. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen	9
2.6. Biaya Operasional Itjen KKP Tahun 2023	10
3. PENUTUP	11

LAMPIRAN

RENJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023	12
--	-----------

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat tahunan dan merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renja memuat rencana atau target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran dan dituangkan dalam indikator kinerja. Sebagai salah satu tahap penyusunan penganggaran Kementerian/Lembaga, Renja disusun pada tahap penerbitan pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran.

Inspektorat Jenderal yang merupakan unsur pengawas dalam suatu organisasi Kementerian/Lembaga, mempunyai tujuan dan target kinerja yang berfungsi terhadap pengawalan dan pengawasan intern atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian/Lembaga. Inspektorat Jenderal KKP dalam hal ini mempunyai tugas dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KKP sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal KKP pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Kelautan dan Perikanan. Implementasi atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tersebut selanjutnya dituangkan di dalam Renja Inspektorat Jenderal.

Penyusunan Renja Inspektorat Jenderal KKP Pagu Alokasi Anggaran (*definitif*) Tahun 2023 disusun berdasarkan pagu alokasi anggaran yang telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pada tahun 2023, terdapat beberapa target kinerja pada Renja yang tertuang dalam bentuk indikator kinerja utama dalam hal pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP. Beberapa target indikator kinerja tersebut meliputi indikator kinerja terkait dengan laporan keuangan KKP, proses pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMN, pelaksanaan kegiatan prioritas, rekomendasi kebijakan, tata kelola organisasi, pembangunan budaya integritas, dan kapabilitas Inspektorat Jenderal KKP.

Berdasarkan pagu alokasi anggaran tahun 2023 yang ditetapkan di internal KKP yang mengacu pada Surat Bersama Pagu Alokasi Anggaran, Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp85,31 Miliar. Pagu alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tersebut sesuai dengan hasil Rapat Kerja (Raker) antara KKP dengan Komisi IV DPR RI dengan rincian biaya operasional sebesar Rp40,53 Miliar dan biaya non operasional sebesar Rp44,78 Miliar. Alokasi anggaran tersebut

merupakan salah sumber daya Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan KKP mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan di Renja Inspektorat Jenderal Tahun 2023.

BAB II
RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

2.1. Kebijakan Pengawasan

2.1.1. Arah Kebijakan Umum Pengawasan Nasional

Arah kebijakan umum pengawasan nasional tahun 2020-2024 tercantum pada beberapa misi Presiden RI tahun 2020-2024 dalam mencapai visi Presiden RI tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Adapun beberapa misi Presiden RI dalam substansi kebijakan umum pengawasan nasional yaitu termaktub pada misi ke-6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” dan misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”. Penjabaran atas kebijakan umum pengawasan nasional terhadap misi Presiden RI dimaksud sebagai berikut:

- a. Misi ke-6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”

Uraian misi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Presiden RI sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan penataan regulasi
- 2) Melanjutkan reformasi birokrasi dan proses penegakan hukum
- 3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 4) Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- 5) Mengembangkan budaya sadar hukum

Terhadap misi dan kegiatan prioritas Presiden RI, kebijakan umum pengawasan nasional dapat diterjemahkan melalui pengawalan pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan implementasi atas kegiatan prioritas ke-3 “Pencegahan dan pemberantasan korupsi” dan kegiatan prioritas ke-5 “Mengembangkan budaya sadar hukum”.

- b. Misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”

Uraian misi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Presiden RI sebagai berikut:

- 1) Aktualisasi demokrasi Pancasila
- 2) Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang profesional

- 3) Reformasi sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi
- 4) Reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien
- 5) Percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
- 6) Reformasi pelayanan publik

Terhadap misi dan kegiatan prioritas Presiden RI, kebijakan umum pengawasan nasional dapat diterjemahkan melalui pengawalan pada organisasi KKP atas implementasi kegiatan prioritas ke-2 “Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang profesional”, kegiatan prioritas ke-3 “Reformasi sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi”, dan kegiatan prioritas ke-6 “Reformasi pelayanan publik”.

2.1.2. Kebijakan Pengawasan Intern di Lingkungan KKP Tahun 2023

Kondisi yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan peran pengawasan intern serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsinya, yaitu “Menjadi Katalisator Pembaharuan Kinerja KKP”. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Cita-cita Inspektorat Jenderal yang ingin menjadi katalisator pembaharuan kinerja, *consulting partner* dan memberikan peringatan dini atas adanya potensi risiko merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja Inspektorat Jenderal lingkup KKP.

Sebagai langkah konkret terhadap cita-cita di atas, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal KKP diarahkan untuk memberikan pengawasan terbaik untuk peningkatan kinerja KKP. Dengan demikian, semakin jelas komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi, yaitu “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Pada tahun anggaran 2023, Inspektorat Jenderal mengarahkan kebijakan pengawasan dalam pencapaian visi dan misi KKP sebagai berikut:

1. Pengawasan akuntabilitas keuangan, pengadaan barang/jasa, Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja KKP.
2. Pengawasan akuntabilitas perizinan sektor kelautan dan perikanan.
3. Pengawasan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Pengawasan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP agar mencapai target dan sesuai dengan ketentuan.
5. Pengawasan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh KKP.
6. Pengawasan percepatan reformasi birokrasi KKP.
7. Pengawasan implementasi manajemen risiko.
8. Pengawasan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KKP.
9. Pengawasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI dan Inspektorat Jenderal.
10. Pengawasan implementasi pelayanan publik di lingkup KKP.
11. Pengawasan percepatan pembangunan budaya integritas dan penerapan program anti korupsi.
12. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

2.2. Program, Kegiatan dan Rincian Output Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal KKP yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi pengawasan intern, secara keseluruhan berlanjut dari tahun 2022 ke tahun 2023. Kegiatan tersebut tertuang melalui rancangan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dengan total alokasi anggaran sebesar Rp85.311.317.000,00. Rincian alokasi anggaran pada masing-masing KRO dan RO pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Rincian Output	Volume	Alokasi Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Dukungan Manajemen				85.311.317
1.	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP			38.586.790
	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen		247.575
	2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen		714.043
	3. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen		396.667

No.	Program/Kegiatan	Rincian Output	Volume	Alokasi Pagu Indikatif (Rp.000)
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	4. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	120.960
		5. Layanan Audit Internal	7 Dokumen	37.022.418
		6. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	85.127
				46.724.527
		1. Pengadaaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	29 Unit	571.928
		2. Layanan BMN	1 Layanan	125.802
		3. Layanan Hukum	1 Layanan	197.482
		4. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	214.725
		5. Layanan Umum	1 Layanan	336.881
		6. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	952.450
		7. Layanan Perkantoran	1 Layanan	40.532.420
		8. Layanan Sarana Internal	122 Unit	1.585.721
		9. Layanan Manajemen SDM	225 Orang	416.624
		10. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	225 Orang	1.790.494

2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Pada tahun 2023 Inspektorat Jenderal KKP telah menentukan sasaran program, indikator kinerja beserta target kinerjanya. Sasaran program Inspektorat Jenderal Tahun 2023, yaitu Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP. Adapun indikator kinerja program Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP, dengan target kinerja sebesar $\leq 1\%$.
2. Tingkat Kapabilitas Itjen KKP, dengan target kinerja level 3.
3. Nilai Evaluasi atas Maturitas SPIP KKP, dengan target kinerja level 3.
4. Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK, dengan target kinerja sebanyak 78 unit kerja.
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP, dengan target kinerja sebesar 82.
6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP, dengan target kinerja sebesar 80.
7. Nilai Integritas KKP, dengan target kinerja sebesar 76.
8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 79.

9. Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, dengan target kinerja sebesar 87%.
10. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 85%.
11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 89%.
12. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 87%.
13. Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP, dengan target kinerja sebesar 81%.
14. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP, dengan target kinerja sebesar 81%.
15. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP, dengan target kinerja sebesar 81%.
16. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP, dengan target kinerja sebesar 75%.
17. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP, dengan target kinerja sebanyak 18 rekomendasi.
18. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 88%.
19. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 80%.
20. Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 4,15.

2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Intern

Kegiatan pengawasan intern dengan nomenklatur kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP dilaksanakan dengan target kinerja yang telah ditentukan untuk mengukur capaian kinerja pengawasan intern. Selain itu, kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP ditetapkan dengan sasaran kegiatan berupa Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra. Adapun indikator kinerja kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat, dengan target kinerja sebesar ≤ 1%.
2. Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat, dengan target kinerja level 3.
3. Unit Kerja Mitra Inspektorat Berpredikat Menuju WBK, dengan target kinerja sebanyak 78 unit kerja.
4. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 32.
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 80.
6. Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 81%.
7. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 81%.
8. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 81%.
9. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 75%.
10. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat, dengan target kinerja sebanyak 18 rekomendasi.
11. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 88%.
12. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 80%.
13. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 100%.
14. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat, dengan target kinerja sebesar 100%.
15. Nilai Integritas KKP, dengan target kinerja sebesar 76.
16. Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP, dengan target kinerja sebesar 70%.
17. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Lingkup KKP, dengan target kinerja sebesar 100%.

2.5. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Kegiatan dukungan manajemen internal dengan nomenklatur kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan target kinerja yang telah ditentukan untuk mengukur capaian kinerja pengawasan intern. Selain itu, kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal ditetapkan dengan sasaran kegiatan berupa Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal. Adapun indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar $\leq 1\%$.
2. Level Kapabilitas Itjen KKP, dengan target kinerja level 3.
3. Tingkat Maturitas SPIP Itjen KKP, dengan target kinerja level 3.
4. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Itjen KKP, dengan target kinerja 32.
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Itjen KKP, dengan target kinerja 80.
6. Indeks Profesionalitas ASN, dengan target kinerja 79.
7. Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, dengan target kinerja sebesar 87%.
8. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 85%.
9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal, dengan target kinerja sebesar 89.
10. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 87.
11. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 75%.
12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 81%.
13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 81%.
14. Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 4,15.
15. Persentase Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Secara Tertib dan Handal, dengan target kinerja sebesar 100%.

16. Persentase Publikasi Informasi dan Kinerja Pengawasan Intern KKP Secara Aktual, dengan target kinerja sebesar 90%.
17. Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Itjen secara Tepat Waktu, dengan target kinerja sebesar 100%.
18. Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 100%.
19. Persentase Pemenuhan Fasilitas Perkantoran Sesuai Kebutuhan Tahunan Itjen KKP, dengan target kinerja sebesar 100%.

2.6. Biaya Operasional Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Biaya operasional merupakan kebutuhan belanja yang wajib dipenuhi untuk menjalankan operasionalisasi perkantoran. Biaya tersebut merupakan belanja mengikat. Biaya operasional merupakan kebutuhan biaya yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional perkantoran. Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal KKP membutuhkan alokasi biaya operasional sebesar Rp40.532.420.000,00. Besaran kebutuhan alokasi biaya operasional tersebut terdiri dari rincian sebagai berikut:

1. Belanja pegawai (001), sebesar Rp35.305.072.000,00
2. Belanja barang operasional (002), sebesar Rp5.227.348.000,00

Kebutuhan alokasi belanja pegawai pada tahun 2023 diperuntukkan pada kebutuhan belanja pegawai sebanyak 225 orang. Perhitungan terhadap kebutuhan alokasi tersebut telah mempertimbangkan adanya faktor pengurang, yaitu adanya pegawai yang purnabakti. Pada perhitungan kebutuhan alokasi belanja pegawai tersebut juga telah memperhitungkan gaji dan tunjangan kinerja ke-13 dan tunjangan kinerja ke-14 (tunjangan hari raya).

**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023**

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 2. UNIT ORGANISASI : 02 - Inspektorat Jenderal

3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 09 - RB KKP yang berkualitas

4. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	TOTAL	ALOKASI 2023 (RIBU)	0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
03	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP	≤1	85.311.317,0
03.01	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	3	
03.02	Tingkat Kapabilitas Ijen KKP	3	
03.03	Nilai Evaluasi atas Maturitas SPIP KKP	78	
03.04	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK	82	
03.05	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP	80	
03.06	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP	76	
03.07	Nilai Integritas KKP	79	
03.08	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ijen KKP	87	
03.09	Unit Kerja Ijen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar		

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
03.10	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	85	
03.11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKA) Itjen KKP	89	
03.12	Nilai Kinerja Anggaran (IKA) Itjen KKP	87	
03.13	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP	81	
03.14	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP	81	
03.15	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP	81	
03.16	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	75	
03.17	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP	18	
03.18	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP	88	
03.19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Lingkup Itjen KKP	80	
03.20	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	4,15	
	Total	85.311.317,0	

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
03	Hasil Pengawasan Internal yang efektif	85.311.317,0
03.01	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran KKP	
03.02	Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP	
03.03	Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup KKP	
03.04	Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup KKP	
03.05	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP	
03.06	Tingkat Maturitas SPIP KKP	
03.07	Nilai PM SAKIP KKP	
03.08	Unit Kerja KKP yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	
03.09	Nilai Integritas KKP	

KODE

OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

ALOKASI 2023 (RIBU)

03.10

Level Kapabilitas Internal Audit (IACM) Itjen

Total

85.311.317,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RP	P NBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2024	2025	2026
2335	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	38.586.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.586.790,0	40.516.116,0	42.541.929,0	44.669.023,0
2336	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	46.724.527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.724.527,0	49.060.747,0	51.513.774,0	54.089.473,0
	Total	85.311.317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.311.317,0	89.576.863,0	94.055.703,0	98.758.496,0

Jakarta, 25 November 2022
Plt. Inspektur Jenderal

Sekretaris Itjen KKP	M
Kabag Program	A
Kasubbag Perencanaan & Penganggaran	JP

Ir. Teuku Niliwan, MM
NIP. 19650825 199403 1 004

KODE

OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

ALOKASI 2023 (RIBU)

03.10

Level Kapabilitas Internal Audit (IACM) Itjen

Total

85.311.317,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2024	2025	2026
2335	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	38.586.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.586.790,0	40.516.116,0	42.541.929,0	44.669.023,0
2336	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	46.724.527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.724.527,0	49.060.747,0	51.513.774,0	54.089.473,0
	Total	85.311.317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.311.317,0	89.576.863,0	94.055.703,0	98.758.496,0

Jakarta, 25 November 2022

Pkt. Inspektur Jenderal

Ir. Teuku Niliwan, MM
NIP. 19650825 199403 1 004

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2. PROGRAM	:	WA - Program Dukungan Manajemen	
3. SASARAN PROGRAM	:	<ul style="list-style-type: none">03 - Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP07 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PSDKP09 - Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP10 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal11 - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen PRL12 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya13 - Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien14 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP15 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BKPM	
4. KEGIATAN	:	2336 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)	:	06 - Sekretariat Itjen	
6. SASARAN KEGIATAN			
KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal	≤1	46.724.527,0
01.01	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Itjen KKP	3	
01.02	Level Kapabilitas Itjen KKP	3	
01.03	Tingkat Maturitas SPIP Itjen KKP	32	
01.04	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Itjen KKP	80	
01.05	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Itjen KKP	79	
01.06	Indeks Profesionalitas ASN		
01.07	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	87	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)							
01.08	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	85								
01.09	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	89								
01.10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP	87								
01.11	Persentase jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen KKP	75								
01.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Itjen KKP	81								
01.13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Itjen KKP	81								
01.14	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	4,15								
01.15	Persentase Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Secara Tertib dan Handal	100								
01.16	Persentase Publikasi Informasi dan Kinerja Pengawasan Intern KKP Secara Aktual	90								
01.17	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Itjen KKP secara Tepat Waktu	100								
01.18	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Itjen KKP	100								
01.19	Persentase Pemenuhan Fasilitas Perkantoran Sesuai Kebutuhan Tahunan Itjen KKP	100								
	Total	46.724.527,0								
7. RINCIAN KEGIATAN										
A. PEMETAAN KEGIATAN										
KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RIMPUTAN	LOKASI PROVINSI	NAWACITA KABUPATEN / KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
01	<i>Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal</i>									46.724.527,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi									571.928,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi								000 - Bukan Tematic	571.928,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN		LOKASI PROVINSI	NAWACITA	PRIORITY NASIONAL	PROGRAM PRIORITY	KEGIATAN PRIORITY	PROYEK PRIORITY	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
	KABUPATEN / KOTA										
	051 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Pusat							571.928,0	
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal									42.359.760,0	
01.EBA.956	Layanan BMN								000 - Bukan Tematik	125.802,0	
	051 - Pengelolaan BMN Itjen									125.802,0	
01.EBA.957	Layanan Hukum	Pusat	Pusat							125.802,0	
	051 - Pengelolaan Hukum, Peraturan dan Perundangan Undangan Bidang Pengawasan								000 - Bukan Tematik	197.482,0	
										197.482,0	
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Pusat							197.482,0	
	051 - Tata Kelola Internal Organisasi Itjen								000 - Bukan Tematik	214.725,0	
		Pusat	Pusat							214.725,0	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITYNASIONAL	PROGRAM PRIORITY	KEGIATAN PRIORITY	PROYEK PRIORITY	DUKUNGANTEMATIK	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBA.962	Layanan Umum							000 - Bukan Tematik		336.881,0	
	051 - Pengelolaan dan Fasilitasi Rumah Tangga Ijien	Pusat	Pusat							336.881,0	
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Pusat	Pusat				000 - Bukan Tematik			952.450,0	
	051 - Analisis Data Hasil Pengawasan	Pusat	Pusat							474.342,0	
	052 - Tata Kelola Data dan Informasi Hasil Pengawasan	Pusat	Pusat							478.108,0	
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	Pusat	Pusat				000 - Bukan Tematik			40.532.420,0	
	001 - Gaji dan Tunjangan	Pusat	Pusat							35.305.072,0	
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pusat	Pusat							5.227.348,0	
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pusat	Pusat							1.585.721,0	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN		PROVINSI	LOKASI NAWACITA KABUPATEN / KOTA	PRIORITY NASIONAL	PROGRAM PRIORITY	KEGIATAN PRIORITY	PROYEK PRIORITY	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								003 - Anggaran Responsif Gender		1.790.494,0
	051 - Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan										1.790.494,0
	Pusat	Pusat									1.790.494,0
											46.724.527,0
								Total			

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)								
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
01	Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal				46.724.527,0				49.060.747,0	51.513.774,0	54.089.473,0		
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit			571.928,0				600.524,0	630.550,0	662.078,0		
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	29	Unit		571.928,0	29	29	29	600.524,0	630.550,0	662.078,0		
01.CAN.001.051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	29,0	Unit		19.721,7	571.928,0	29,0	29,0	600.524,0	630.550,0	662.078,0		
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit	42.359.760,0			44.477.746,0	46.701.632,0	49.036.713,0		
01.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan			125.802,0	1	1	1	132.092,0	138.696,0	145.631,0	

KODE	SASARAN KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.EBA.956.051	Pengelolaan BMN Itjen	1,0	Layanan	125.802,0	125.802,0	1,0	1,0	1,0	132.092,0	138.696,0	145.631,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	197.482,0	197.482,0	1	1	1	207.356,0	217.723,0	228.610,0
01.EBA.957.051	Pengelolaan Hukum, Peraturan dan Perundang-Undangan Bidang Pengawasan	1,0	Layanan	197.482,0	197.482,0	1,0	1,0	1,0	207.356,0	217.723,0	228.610,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	214.725,0	214.725,0	1,0	1,0	1,0	225.461,0	236.734,0	248.571,0
01.EBA.960.051	Tata Kelola Internal Organisasi Itjen	1,0	Layanan	214.725,0	214.725,0	1,0	1,0	1,0	225.461,0	236.734,0	248.571,0
01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	336.881,0	336.881,0	1	1	1	353.725,0	371.411,0	389.981,0
01.EBA.962.051	Pengelolaan dan Fasilitasi Rumah Tangga Itjen	1,0	Layanan	336.881,0	336.881,0	1,0	1,0	1,0	353.725,0	371.411,0	389.981,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	952.450,0	952.450,0	1	1	1	1.000.072,0	1.050.076,0	1.102.579,0
01.EBA.963.051	Analisis Data Hasil Pengawasan	1,0	Layanan	474.342,0	474.342,0	1,0	1,0	1,0	498.059,0	522.962,0	549.110,0
01.EBA.963.052	Tata Kelola Data dan Informasi Hasil Pengawasan	1,0	Layanan	478.108,0	478.108,0	1,0	1,0	1,0	502.013,0	527.114,0	553.469,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	40.532.420,0	40.532.420,0	1	1	1	42.559.040,0	44.686.992,0	46.921.341,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	1,0	Layanan	35.305.072,0	35.305.072,0	1,0	1,0	1,0	37.070.325,0	38.923.841,0	40.870.033,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	5.227.348,0	5.227.348,0	1,0	1,0	1,0	5.488.715,0	5.763.151,0	6.051.308,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket			1.585.721,0			1.665.006,0	1.748.257,0	1.835.670,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	122	Unit			1.585.721,0	122	122	1.665.006,0	1.748.257,0	1.835.670,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023									
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023									
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		1.585.721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.585.721,0
01.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Pendukung	613.210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613.210,0
01.EBB.951.053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pendukung	972.511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972.511,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		2.207.118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.207.118,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		416.624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416.624,0
01.EBC.954.051	Perencanaan, Pengembangan dan Tata Kelola Kepangkapan Pegawai Ijen	Utama	204.516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204.516,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Utama	132.052,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132.052,0
01.EBC.954.053	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Utama	80.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.056,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		1.790.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.790.494,0
01.EBC.996.051	Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan	Utama	1.790.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.790.494,0
	Total		46.724.527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.724.527,0

Sekretaris Ijen KKP	Nr
Kabag Program	X
Kasubbag Perencanaan & Penganggaran	X

Jakarta 25 November 2022
Bpk. Inspektur Jenderal
Ir. Teuku Nillwan, MM
NIP. 19650825 199403 1 004

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023									
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		1.585.721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.585.721,0
01.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Pendukung	613.210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613.210,0
01.EBB.951.053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pekantoran	Pendukung	972.511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972.511,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		2.207.118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.207.118,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		416.624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416.624,0
01.EBC.954.051	Perencanaan, Pengembangan dan Tata Kelola Kepangkapan Pegawai Itjen	Utama	204.516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204.516,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Utama	132.052,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132.052,0
01.EBC.954.053	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Utama	80.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.056,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		1.790.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.790.494,0
01.EBC.996.051	Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan	Utama	1.790.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.790.494,0
	Total		46.724.527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.724.527,0

Jakarta, 25 November 2022
Pit. Inspektur Jenderal

Ir. Teuker Niawan, MM
NIP. 19650825 199403 1 004

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM	:	WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM	:	03 - Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP 07 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PSDKP 09 - Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP 10 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal 11 - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya 12 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya 13 - Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 14 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP 15 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BKPM
4. KEGIATAN	:	2335 - Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)	:	06 - Sekretariat Ijen 05 - Inspektorat V

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2023	ALOKASI 2023
			(RIBU)
01	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra	≤ 1	38.586.790,0
01.01	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat	3	
01.02	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat	78	
01.03	Unit Kerja Mitra Inspektorat Berpredikat Menuju WBK	32	
01.04	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat	80	
01.05	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat	80	
01.06	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat	81	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)							TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)		
01.07	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat							81			
01.08	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat							81			
01.09	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat							75			
01.10	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat							18			
01.11	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat							88			
01.12	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Lingkup Inspektorat							80			
01.13	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat							100			
01.14	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat							100			
01.15	Nilai Integritas KKP							76			
01.16	Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP							70			
01.17	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Lingkup KKP							100			
	Total							38.586.790,0			
7. RINCIAN KEGIATAN											
A. PEMETAAN KEGIATAN											
KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
01	<i>Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra</i>									38.586.790,0	
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal									38.586.790,0	
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran									000 - Bukan Tematik	247.575,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN		LOKASI PROVINSI	NAWACITA KABUPATEN / KOTA	PRIORITY NASIONAL	PROGRAM PRIORITY	KEGIATAN PRIORITY	PROYEK PRIORITY	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
	051 - Perencanaan Kinerja dan Program Itjen		Pusat	Pusat						155.522,0	
	052 - Penganggaran Itjen		Pusat	Pusat						92.053,0	
	051 - Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Itjen		Pusat	Pusat					000 - Bukan Tematik	92.053,0	
	052 - Pengelolaan Kinerja Organisasi Itjen		Pusat	Pusat						714.043,0	
	053 - Penguatan Internal Audit Capability Model Itjen		Pusat	Pusat						253.172,0	
	051 - Pengelolaan Keuangan		Pusat	Pusat						88.900,0	
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Pusat	Pusat						88.900,0	
	051 - Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Itjen								000 - Bukan Tematik	371.971,0	
										371.971,0	
										396.667,0	
										396.667,0	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN		LOKASI PROVINSI	NAWACITA KABUPATEN / KOTA	PRIORITY NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		Pusat	Pusat					000 - Bukan Tematik		396.667,0
	051 - Implementasi Reformasi Birokrasi Itjen		Pusat	Pusat						120.960,0	120.960,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal								000 - Bukan Tematik		37.022.418,0
	051 - Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I									4.081.147,0	4.081.147,0
	052 - Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I		Pusat	Pusat						2.215.200,0	2.215.200,0
	053 - Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II		Pusat	Pusat						4.290.251,0	4.290.251,0
	054 - Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II		Pusat	Pusat						2.215.200,0	2.215.200,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN		LOKASI PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	NAMA CITA	PRIORITY NASIONAL	PROGRAM PRIORITY	KEGIATAN PRIORITY	PROYEK PRIORITY	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
055 - Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III	Pusat	Pusat									3.522.062,0	
056 - Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat III	Pusat	Pusat									3.103.920,0	
057 - Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV	Pusat	Pusat									3.601.291,0	
058 - Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat IV	Pusat	Pusat									2.532.600,0	
059 - Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup KKP	Pusat	Pusat									2.532.600,0	
060 - Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pusat	Pusat									6.036.746,0	
											323.169,0	
											323.169,0	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN		LOKASI	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
01.EBD.974	061 - Kerja Sama dan Sinergi Pengawasan Intern	Pusat	Pusat						000 - Bukan Tematik			5.100.832,0	85.127,0
	051 - Pengelolaan Arsip lingkup Itjen	Pusat	Pusat									85.127,0	85.127,0
								Total				38.586.790,0	
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU)													
KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN		TAHUN 2023	PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			ALOKASI (RIBU)						
	VOLUME / TARGET	SATUAN		SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
01	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra				38.586.790,0					40.516.116,0	42.541.929,0	44.669.023,0	
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi			38.586.790,0					40.516.116,0	42.541.929,0	44.669.023,0	
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen			247.575,0	1	1	1	259.953,0	272.951,0	286.598,0		
01.EBD.952.051	Perencanaan Kinerja dan Program Itjen	1,0 Dokumen			155.522,0	155.522,0	1,0	1,0	0,0	163.298,0	171.463,0	180.036,0	
01.EBD.952.052	Penganggaran Itjen	1,0 Dokumen			92.053,0	92.053,0	1,0	1,0	0,0	96.655,0	101.488,0	106.562,0	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023		PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2023 (RP RIBU)		VOLUME / TARGET		ALOKASI (RIBU)			
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	714.043,0	1	1	749.744,0	787.232,0	826.592,0	293.078,0	
01.EBD.953.051	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Itjen	1,0	Dokumen	253.172,0	253.172,0	1,0	1,0	265.830,0	279.122,0	98.012,0	102.912,0
01.EBD.953.052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Itjen	1,0	Dokumen	88.900,0	88.900,0	1,0	1,0	93.345,0	98.012,0	430.602,0	
01.EBD.953.053	Penguatan Internal Audit Capability Model Itjen	1,0	Dokumen	371.971,0	371.971,0	1,0	1,0	390.569,0	410.098,0		
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	396.667,0	1	1	416.500,0	437.325,0	459.191,0		
01.EBD.955.051	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Itjen	1,0	Dokumen	396.667,0	396.667,0	1,0	1,0	416.500,0	437.325,0	459.191,0	
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen	120.960,0	120.960,0	1	1	127.000,0	133.358,0	140.026,0	
01.EBD.961.051	Implementasi Reformasi Birokrasi Itjen	1,0	Dokumen	120.960,0	120.960,0	1,0	1,0	127.000,0	133.358,0	140.026,0	
01.EBD.965	Layanan Audit Internal	7	Dokumen	37.022.418,0	7	7	38.873.536,0	40.817.211,0	42.858.071,0		
01.EBD.965.051	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I	7,0	Dokumen	583.021,0	4.081.147,0	7,0	7,0	4.285.204,0	4.499.464,0	4.724.437,0	
01.EBD.965.052	Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I	7,0	Dokumen	316.457,1	2.215.200,0	7,0	7,0	2.325.960,0	2.442.258,0	2.564.370,0	
01.EBD.965.053	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II	7,0	Dokumen	612.893,0	4.290.251,0	7,0	7,0	4.504.763,0	4.730.001,0	4.966.501,0	
01.EBD.965.054	Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II	7,0	Dokumen	316.457,1	2.215.200,0	7,0	7,0	2.325.960,0	2.442.258,0	2.564.370,0	
01.EBD.965.055	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III	7,0	Dokumen	503.151,7	3.522.062,0	7,0	7,0	3.698.165,0	3.883.073,0	4.077.227,0	

C. SUMBER PENDANAAN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023									
			R P	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN
01.EBD.965.057	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV	Utama	3.601.291,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.601.291,0
01.EBD.965.058	Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat IV	Utama	2.532.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.532.600,0
01.EBD.965.059	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup KKP	Utama	6.036.746,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.036.746,0
01.EBD.965.060	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Utama	323.169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323.169,0
01.EBD.965.061	Kerja Sama dan Sinergi Pengawasan Intern	Pendukung	5.100.832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.100.832,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		85.127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.127,0
01.EBD.974.051	Pengelolaan Arsip lingkup Itjen	Pendukung	85.127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85.127,0
	Total		38.586.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.586.790,0

Jakarta, 25 November 2022
Pjt. Inspektur Jenderal

Ir. Teuku Niliwati MM
NIP. 19650825 199403 1 004